

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, LEVERAGE, UKURAN PEMERINTAHAN, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Dessy Riani<sup>1\*</sup>, Junita Putri Rajan Hrp<sup>2\*</sup>**

<sup>1\*)</sup>Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan,  
email : [dessyriani04@gmail.com](mailto:dessyriani04@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to determine whether the effect of local revenue, leverage, government size, and balancing funds on the financial performance of local governments either simultaneously or partially in districts/cities in North Sumatra Province. The research method in this thesis is using quantitative research, with a total sample of 33 from 25 districts and 8 cities in North Sumatra Province which was conducted for the 2018-2020 period. The type of data used is secondary data. This data was obtained through the website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). The data that has been collected was analyzed by data analysis methods which were first carried out by testing the classical assumptions before testing the hypothesis. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with F test and t test. The results show that simultaneously local revenue, leverage, government size, and balancing funds on the financial performance of local governments have a significant effect on the financial performance of local governments. Partially, the local revenue variable has a positive and significant effect on the financial performance of local governments. Partially, the leverage variable has a positive and significant effect on the financial performance of local governments. Partially, the variables of the size of the local government are leverage, the size of the government, and the balancing fund on the financial performance of the local government. Partially, the balancing fund variable has a positive and significant effect on the financial performance of local governments.*

**Keywords:** *The Effect of Regional Original Income, Leverage, Government Size, and Balancing Funds on Regional Government Financial Performance*

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dengan menggunakan sistem

keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini

diharapkan pemerintah daerah akan lebih aktif dalam membangun daerahnya dan mengambil keputusan seluas-luasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan.

Mendukung kebijakan otonomi daerah maka ditetapkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara susunan pemerintahan. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik Republik Indonesia (BPS RI), kinerja keuangan pada provinsi Sumatra Utara hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Sumatra Utara yang diukur dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi Sumatra utara Pada Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
2018	5.287.469.402	6.928.134.940
2019	5.761.270.412	7.300.647.588
2020	7.583.849.755	7.736.050.763

Sumber: BPS RI

Berdasarkan pada tabel di atas dana perimbangan lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Artinya pemerintahan belum mampu menurunkan kontribusi terhadap realisasi terhadap dana perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintahan daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan revenue oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai belanja daerahnya. Saat ini dana perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kegiatannya.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar satu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Semakin besar tingkat leverage maka kinerja keuangan pemerintah akan menurun. Dengan mengetahui tingkat leverage atau kemampuan suatu daerah dalam melunasi utang-utangnya maka kreditor dapat menentukan untuk berinvestasi atau tidak.

Ukuran pemerintah merupakan bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Size dapat diukur salah satunya adalah dengan jumlah aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Besarnya total aset pemerintah daerah dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah yang memiliki ukuran aset yang besar, maka ukuran daerah yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah yang memiliki ukuran daerah yang kecil.

## 2. METODE

Populasi pada penelitian adalah seluruh kabupaten/kota, terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2018 s/d 2020.

Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti berjumlah 33 Kabupaten/Kota x 3 tahun = 99 Populasi. Sampel penelitian ini didapatkan sebanyak 33 sampel, yang memenuhi kriteria terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota Provinsi Sumatera Utara. Jadi seluruh sampel penelitian adalah 99 sampel (33x3 tahun pengamatan penelitian).

**Teknik analisis data**

Berikut ini teknik analisis data yang digunakan, yaitu :

**Uji Normalitas**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

**Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas uji multikolinearitas atau tidak terjadi kolerasi diantar variabel independen.

**Uji Heterokedastitas**

Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastitas dan jika berbeda disebut heterokedastitas.

**Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel bebas

**Uji Parsial (Uji-t)**

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

**Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

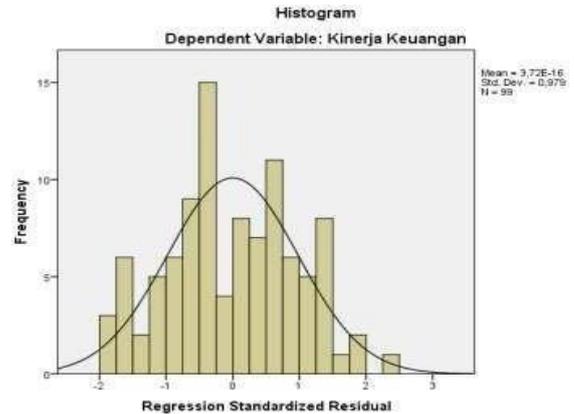
**Koefisien Determinan (R-Square)**

Untuk melihat seberapa besar tingkat

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Normalitas**



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar di atas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficientsa**

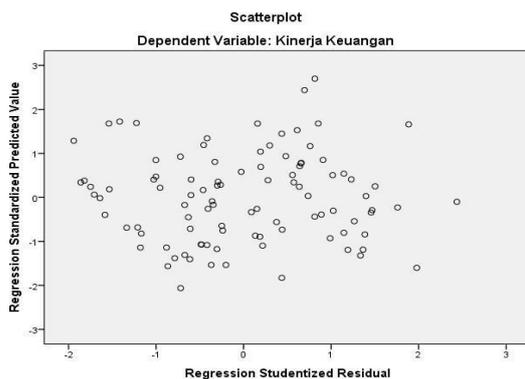
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	707	139		,100	000		
Pendapatan Asli Daerah	,743	,000	,037	,258	007	469	,134
	,019	,088	,021	,213	002	988	,012
	,768	,000	,304	,164	033	480	,085

Leverage	,196	,000	,230	,290	,024	,944	,059
Ukuran Pemerintahan							
Dana Perimbangan							

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan  
 Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel independen < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja Keuangan.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	0,707	,139		,100	,000		,134
Pendapatan Asli Daerah	6,743	,000	,037	,258	,007		,469
Leverage	0,019	,088	,021	,213	,002		,988
Ukuran Pemerintahan	0,304	,000	,304	,164	,033		,480
Dana Perimbangan	0,230	,000	,230	,290	,024		,944

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan  
 Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Nilai constant (a) = 0,707 artinya apabila skor variabel Pendapatan Asli Daerah. Leverage, Ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan sama dengan nol, maka Kinerja Keuangan meningkat sebesar 0,707.
- b. Ketika variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar 6,743 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- c. Ketika variabel Leverage (X2) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar 0,019 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- d. Ketika variabel Ukuran Pemerintahan

(X3) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar 8,768 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

- e. Ketika variabel Dana Perimbangan (X4) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar 2,196 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui, bahwa hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan adalah hubungan yang positif dimana ketika Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan ditingkatkan, maka akan berdampak pada kenaikan Kinerja Keuangan.

#### Uji Parsial (*t*-tes)

Model	Unstan dardize d Coeffi cients		Stand ardize d Coeffi cients  Beta	t	S i g.	Collin earity Statist ics	T o l e r a n c e	
	B	Std. Error					V I F	
(Co nsta nt)	,70 7	,139		5, 10	,0 0		2, 13	
Pen dapa tan	6,7 43	,088	-,021	6, 25	,0 0	,46 9	4	
Asli Daerah	,01 9	,000	-,304	8 7	,98 8		1, 01	
1 Lever age	8,7 68		,230	7, 21	,0 0	,48 0	2, 08	
Ukura n Pemer intaha n	2,1 96			3 2	,94 4		5	
				7, 16	,0 3		1, 05	
				4 3			9	
				5, 29	,0 2			
				0 4				

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 6,528 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena thitung untuk variabel X1 (6,528) lebih besar dari ttabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sehingga membuktikan bahwa H1 diterima.

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut ibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar nilai thitung sebesar 6,528 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena thitung untuk variabel X1 (6,528) lebih besar dari ttabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, dimana setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya penurunan PAD akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah.

#### Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian secara parsial, mengenai Pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2018-2020. Maka variabel leverage (X2) dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 7,213 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena thitung untuk variabel X2 (7,213) lebih besar dari ttabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Maka hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### Pengaruh Ukuran Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian secara parsial, mengenai pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2018-2020 yang diperoleh nilai thitung sebesar 7,164 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena thitung untuk variabel X3 (7,164) lebih besar dari ttabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,033 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Ukuran Pemerintahan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian secara parsial, mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2018-2020 yang diperoleh nilai thitung sebesar 5,290 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena thitung untuk variabel X4 (5,290) lebih besar dari ttabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

### **3. KESIMPULAN**

1. Secara simultan pendapatan asli daerah, leverage, ukuran pemerintah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Secara parsial variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah leverage, ukuran pemerintah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Secara parsial variabel dana

perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian (2017). Indikator kinerja keuangan pemerintah. program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018
- Fahmi (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018. Hal-142-146
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (5th ed.). Semarang: BPFE Universitas Diponegoro
- Irene, M., & Siregar, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Papua. 5(1), 26-42
- Kecil, M., Menengah, D. A. N., Di, U., & Jambi, K. (2021). Pemanfaatan Informasi Akuntansi Pada Usaha Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Kusumawardani, M. (2017). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang, 1(1), 28-35
- Library, U. M. S. D., & Library, U. M. S. D. (2018). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
- Mardiasmo (2017). Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan. mengukur tingkat kepuasan individual dan kelompok secara rasional. Hal-121
- Martantri, Nurlita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, Pertumbuhan ekonomi, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

- Tengah. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 1(1), 15-26
- Nasution, N. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Panca Budi, 8(1), 1-19.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jakarta
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018

